

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Masyarakat yang majemuk tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan lainnya. Namun terkadang perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang plural menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Maka sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan, dimunculkanlah konsep kemajemukan (*pluralisme*).

1. Sikap yang tepat menurut KH. Abdurrahman Wahid dalam menghadapi pluralitas masyarakat baik pluralitas agama maupun budaya serta pluralitas etnik adalah menempatkan setiap kelompok masyarakat setara dengan kelompok lain dalam hal apapun tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama untuk berpendapat di muka umum, berkarya, beribadah, serta mendapatkan keadilan tanpa membedakan unsur agama, suku, gender, dan kewarganegaraan. Setiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog Indonesia dapat dibangun menjadi negara yang berbudaya dan beradab, aman dan damai. Nilai-nilai universal Islam

lebih penting ketimbang formalisasi Islam yang hanya bersifat *legal-formal*, yang cenderung mengutamakan substansi Islam karena dengan demikian nilai-nilai universal Islam tidak hanya milik orang Islam tapi juga milik non muslim seperti: demokrasi, keadilan dan persamaan. Sikap kritis harus tetap dilakukan guna memberikan masukan bagi perbaikan kehidupan. Dengan demikian, Islam akan selalu dinamis dan tidak akan kehilangan relevansinya.

2. Pendidikan merupakan institusi dan media paling efektif dalam mengelola keragaman. Pendidikan Islam yang merupakan sub sistem pendidikan nasional mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya transformasi nilai-nilai religiusitas, kebangsaan, dan kemanusiaan kepada peserta didik. Dalam menghadapi pluralitas masyarakat: multi etnik dan multi religi yang dibutuhkan adalah paradigma pendidikan yang toleran, inklusif dan berorientasi pada kesalehan sosial dengan tidak melupakan kesalehan individual. Cara belajar pun harus dirubah dari metode ceramah menjadi *problem solving*, dari menghafal materi sebanyak-banyaknya menjadi penguasaan metodologi, dari memandang ilmu sebagai hasil final menjadi memandang ilmu sebagai proses yang dinamis. Pendidik memandang anak didik sebagai pribadi otonom dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga akan tercipta daya kreativitas peserta didik. Materi pendidikan seharusnya mencakup nilai-nilai universal yang dimiliki agama diantaranya: nilai-nilai persamaan, keadilan, keterbukaan, kejujuran serta adab sopan santun.

B. Saran

Pendidikan pluralisme yang ditawarkan oleh Gus Dur merupakan salah satu alternatif model pendidikan dalam rangka menyongsong kehidupan modern yang serba heterogen dan rawan akan konflik horizontal. Ide dan pemikiran yang diusung oleh Gus Dur patut dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sebuah pembelajaran yang berbasis pluralisme, sehingga dalam implementasi pendidikan akan terjadi reinterpretasi baru dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang berkarakter dan penuh dengan nilai toleransi untuk hidup bersama banyak orang.

Pluralisme Gus Dur dipandang dari sudut pendidikan pluralisme yang dikonsepsikan oleh penulis ini tentunya akan sedikit memberi warna dalam hal unsur-unsur nilai yang harus dimasukkan dalam tatanan pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan yang sangat mulia yang ingin dicapai oleh Gus Dur ialah bahwa pluralitas yang ada itu tidak usah kita pungkiri dan persoalkan, malahan pluralitas yang ada itu harus kita manfaatkan untuk saling mengisi dan melengkapi kekosongan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dengan menjaga nilai pluralistik kita akan menjadi bangsa yang kuat dan kaya.